

Mewujudkan pendanaan yang bertanggung jawab dan inklusif di sektor kelapa sawit

Retno Kusumaningtyas^a dan Jan Willem van Gelder^a

Pesan kunci

- Banyak pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, perusahaan produksi dan pengolahan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), berupaya mewujudkan sektor kelapa sawit lebih lestari. Meski jumlah petani cukup signifikan dalam budi daya kelapa sawit, perhatian terhadap praktik petani dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan masih relatif kecil.
- Penyedia Jasa Keuangan (Financial Service Providers/FSP), seperti perbankan dan dana pensiun dapat berperan lebih besar dalam membangun sektor kelapa sawit yang lestari dan inklusif. FSP bisa menautkan prasyarat Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (Environmental, Social and Governance (ESG) pada layanan jasa keuangan yang mereka berikan pada perusahaan sawit yang mengambil bahan baku produk dari petani.
- Mayoritas dana untuk perusahaan kelapa sawit besar berasal dari FSP di Jepang, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Saat ini berbagai FSP tersebut tidak memiliki kebijakan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) yang memadai.
- Kebijakan FSP Eropa dan Amerika lebih maju dalam menjawab isu deforestasi dan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Walaupun demikian, mereka masih belum memperhatikan petani kecil dalam rantai pasokan yang berkelanjutan.
- Akibat perbedaan antara kebijakan ESG yang dianut FSP Eropa dan Amerika dibandingkan dengan FSP Asia, perusahaan kelapa sawit masih memiliki banyak alternatif untuk mendapatkan permodalan dengan persyaratan minim. Akibatnya, potensi kontribusi penting FSP dalam memperkuat sektor kelapa sawit lebih lestari masih belum optimal.
- Adopsi kebijakan ESG yang lebih layak oleh FSP Asia hanya bisa terjadi apabila FSP lebih memahami risiko finansial dari praktik bisnis seperti biasa (business as usual). Kedua, tekanan dari sesama FSP yang berasal dari Eropa dan Amerika serta berbagai inisiatif lestari bisa turut mendorong proses. Ketiga, regulator finansial di negara produsen kelapa sawit terus mencari instrumen yang dapat menstimulasi sektor finansial agar lebih berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pendahuluan

Sektor kelapa sawit global menghadapi berbagai tantangan, antara lain deforestasi, pembangunan lahan gambut (yang menjadi penyebab utama perubahan iklim), pelanggaran hak buruh dan konflik hak lahan dengan masyarakat lokal. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan perkebunan, konsumen, perusahaan pengolahan, pemerintah, dan

LSM mencoba mengembangkan inisiatif seperti RSPO¹ untuk mendorong transformasi lestari di sektor ini. Tetapi masih menjadi pertanyaan apakah tantangan sosial dan lingkungan bagi petani kecil di sektor kelapa sawit sudah

¹ Roundtable on Sustainable Palm Oil (Meja Bundar Sawit Lestari) merupakan sebuah inisiatif multi-pemangku kepentingan internasional yang beranggotakan perusahaan, pemerintah dan LSM. RSPO mengadopsi Prinsip dan Kriteria Produksi Kelapa Sawit Lestari dan telah meluncurkan Sistem Sertifikasi RSPO. Saat ini, Sistem Sertifikasi RSPO adalah satu-satunya sertifikasi yang diadopsi luas oleh para pemangku kepentingan sektor kelapa sawit.

^a Profundo

mendapatkan perhatian yang cukup dari berbagai inisiatif ini. Faktanya, petani berkontribusi pada 40% lahan perkebunan kelapa sawit dan 30% total produksi.

Petani mandiri hanya mendapat sedikit bantuan teknis dan finansial, hingga mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas. Ketergantungan pada pedagang, membuat mereka sering menghadapi harga buah sawit yang murah. Untuk memperoleh penghasilan yang cukup, mereka terdorong memperluas lahan ke kawasan hutan dan gambut. Petani yang tergabung dalam koperasi atau skema yang dikelola perusahaan biasanya lebih mendapat bantuan, namun mereka menghadapi bunga tinggi, penantian alokasi lahan dan kredit yang lama, alokasi petak yang sulit diakses, larangan tumpang sari dan tingginya biaya reklamasi lahan. Seringkali, mereka tidak mendapatkan upah layak dan terpaksa berurusan dengan eksploitasi berlebihan sumber air dan meningkatnya biaya hidup (Bronkhorst E et al. 2017).

Mengintegrasikan petani dalam rantai pasokan kelapa sawit lestari, menjamin upah yang layak, memberikan bantuan teknis dan finansial serta menerapkan praktik produksi lebih lestari dalam mencegah deforestasi lebih jauh, merupakan tantangan bagi industri secara keseluruhan.

Penyedia jasa keuangan (Financial Service Providers/ FSP) seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga investor lain, bisa berperan dalam mendorong komitmen lestari dan sepatutnya untuk melibatkan petani dalam konteks yang adil dan lestari dalam rantai pasokan berkelanjutan dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mereka danai. Penyediaan jasa keuangan dapat memberikan pengaruh melalui kemampuan mereka menetapkan aspek-aspek Lingkungan Hidup, Sosial dan Tata Kelola (ESG) sebagai bagian dari persyaratan pinjaman, investasi dan jasa keuangan lainnya. Dalam 15 tahun terakhir, integrasi kebijakan ESG dalam keputusan pembiayaan dan investasi FSP makin berkembang untuk menghadapi risiko reputasi, keuangan dan resiko kepatuhan dari perusahaan dan proyek yang tidak lestari dalam perspektif sosial dan lingkungan. Tren ini didorong oleh inisiatif sektor keuangan seperti Prinsip Ekuator (*Equator Principle*; EP)² untuk perbankan dan Prinsip Investasi Bertanggung Jawab (*Principles for Responsible Investment*; PRI)³ untuk para lembaga investasi.

2 Inisiatif Prinsip Ekuator (*Equator Principle/EP*) diluncurkan oleh sekelompok bank terkemuka untuk memberi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pasar proyek pendanaan. EP terkait dengan pendanaan proyek, pendanaan jenis khusus untuk perusahaan besar dan proyek besar. EP menjalankan prosedur analisis risiko dan Standar Performa dari International Finance Corporation (IFC).

3 Sekelompok perusahaan manajemen aset, dana investasi dan dana pensiun terkemuka menjadi anggota Prinsip Investasi Bertanggung Jawab (*Principles for Responsible Investment/PRI*). PRI fokus pada implikasi investasi pada lingkungan hidup, sosial dan tata kelola (ESG), dan mendorong integrasi standar ESG dalam keputusan investasinya.

Penelitian ini dilakukan untuk lebih memahami bagaimana kebijakan ESG dari FSP mampu mendorong sektor kelapa sawit lebih lestari, termasuk standar hidup lebih baik dan praktik budi daya lebih berkelanjutan dari para petani. (Kusumaningtyas dan van Gelder 2017).

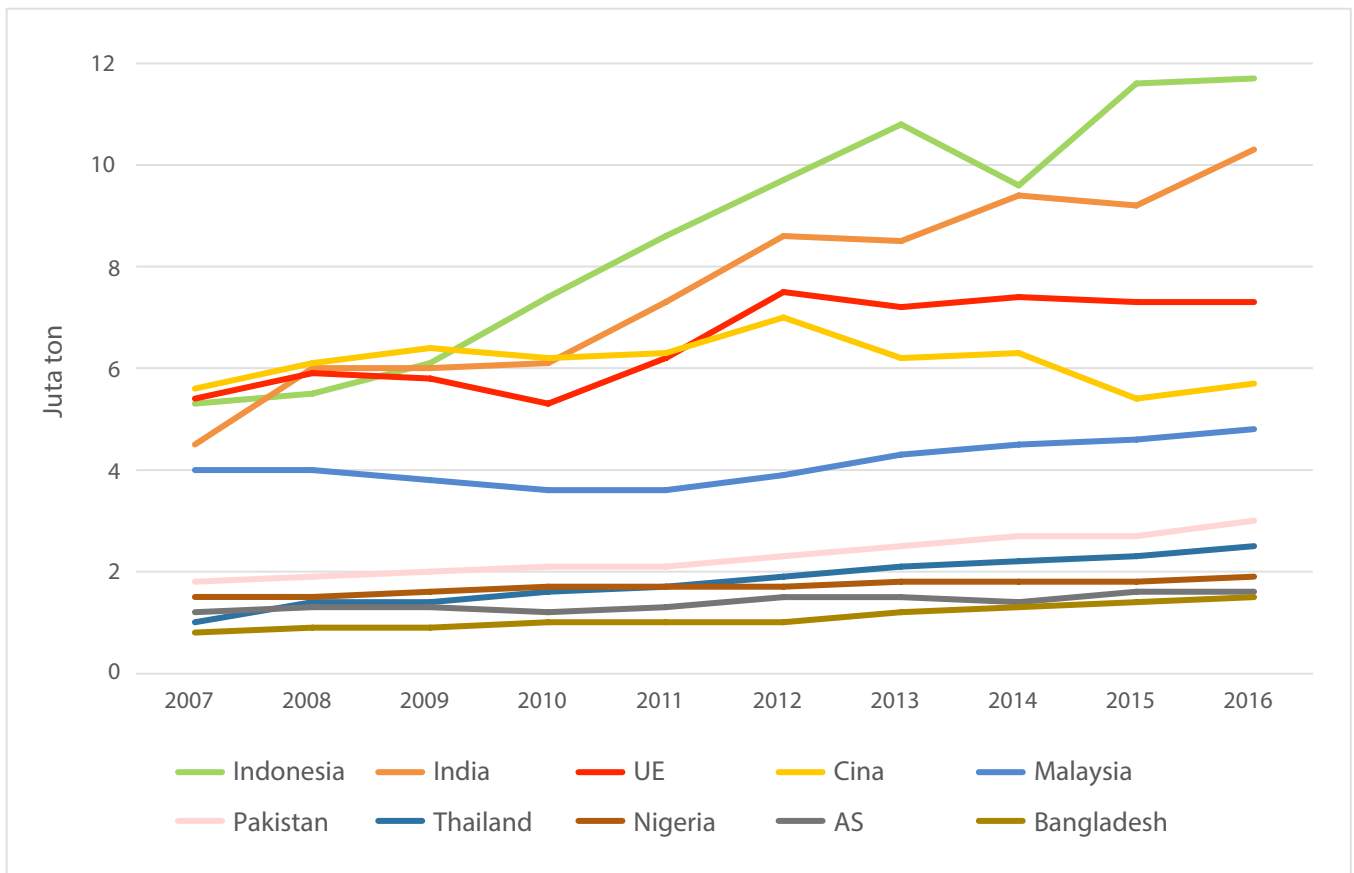
Konteks ekonomi sektor kelapa sawit

Malaysia mendominasi ekspor global kelapa sawit sejak paruh 1960-an, dan Indonesia berkembang menjadi produsen utama kelapa sawit mulai 1990-an. Gabungan ekspor minyak sawit dan minyak inti sawit dari kedua negara mencapai sekitar 90% ekspor global dalam lima tahun terakhir (2012–2016) (USDA 2017).

Permintaan global kelapa sawit terus tumbuh, terutama didorong oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya produk domestik bruto berbagai negara berkembang, khususnya di India dan Cina. Tahun 2016, negara-negara Asia menyerap sekitar 66% total konsumsi minyak sawit, jauh melampaui Eropa dan Amerika Serikat (USDA 2017).

Indonesia bukan hanya menjadi produsen dan eksportir terbesar, tetapi sejak 2010 juga menjadi konsumen terbesar minyak sawit dan kernel sawit. Tahun 2016, konsumsi domestik minyak sawit dan kernel sawit Indonesia mencapai 11,7 juta ton (17% dari total konsumsi dunia), dengan total produksi 39 juta ton. India menjadi konsumen terbesar kedua, diikuti oleh Eropa. Konsumsi domestik Malaysia tahun 2016, adalah 4,8 juta ton (7% dari total konsumsi dunia), dengan total produksi 22,4 juta ton (USDA 2017). Gambar 1 menyajikan konsumsi 10 negara konsumen kelapa sawit terbesar.

Dalam hal pertumbuhan konsumsi domestik, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dengan pertumbuhan sebesar 120% dalam 10 tahun terakhir. Thailand menjadi negara dengan pertumbuhan konsumsi terbesar yaitu 150%, dan India menempati peringkat kedua dengan pertumbuhan 130% konsumsi domestik kelapa sawit dalam periode yang sama (USDA).



Gambar 1. "10 Besar" konsumen minyak sawit dunia, dalam juta ton

Sumber: PSDonline, "Oil, palm; oil, palm kernel – Export – 2012-2016", USDA Foreign Agricultural Service.

Pemberi modal dan kebijakan permodalan sektor kelapa sawit

Penelitian ini menganalisis data untuk mengidentifikasi Penyedia Jasa Keuangan (FSP) mana yang membiayai 15 perusahaan kelapa sawit terbesar (seluruhnya berbasis di Indonesia, Malaysia atau Singapura), melalui pinjaman dan jasa terkait penerbitan obligasi dan saham. Total sebanyak 15 FSP memberikan 72% dari total jumlah pinjaman perusahaan terpilih antara 2006 dan 2015, dan memberikan 88% jasa keuangan terkait surat utang dan saham dalam periode tersebut. Di antara 15 FSP tersebut, FSP Jepang memberikan nilai pinjaman dolar terbesar, diikuti FSP berbasis di Singapura dan Eropa. Sementara, jasa keuangan untuk penerbitan surat utang (bond) dan saham sebagian besar diberikan oleh FSP yang berbasis di Malaysia, diikuti oleh AS dan Eropa. Gambar 2 menampilkan sebaran distribusi sumber dana di beberapa perusahaan terpilih.

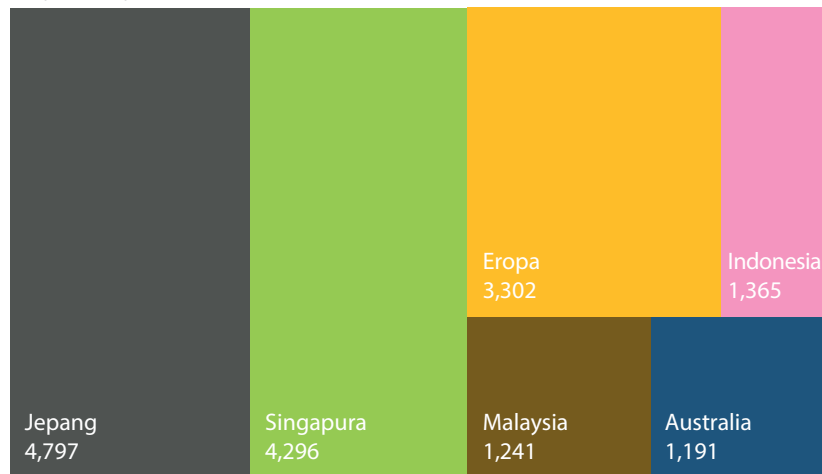
Penelitian terhadap 15 FSP penyedia dana terbesar menunjukkan bahwa FSP Eropa dan Amerika lebih maju

dibandingkan mitranya di Asia dalam mengadopsi kebijakan yang mensyaratkan kriteria Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) ketika memberikan pelayanan jasa keuangan pada perusahaan di sektor kelapa sawit. Selain sertifikasi RSPO, FSP dari Eropa dan Amerika Serikat seringkali menetapkan kriteria spesifik-sektoral sebagai persyaratan pendanaan. Kebijakan ini biasanya ada dalam kerangka kebijakan untuk pertanian dan kehutanan, tetapi seringkali juga ada sebagai kebijakan khusus untuk sektor kelapa sawit.

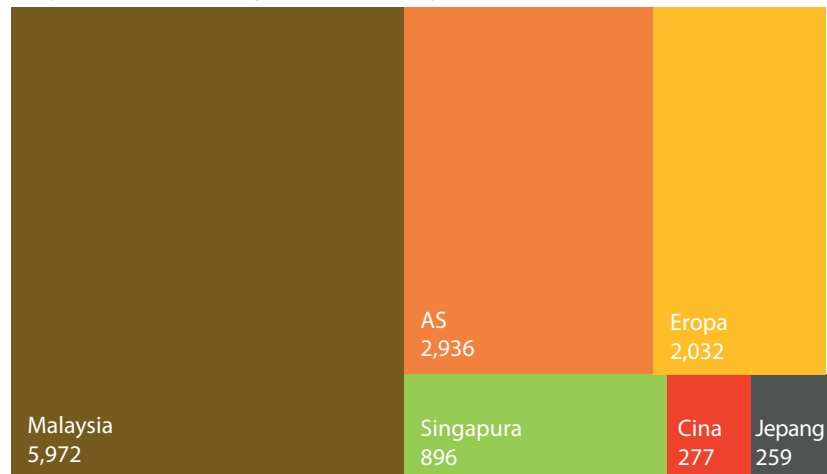
Salah satu alasan utama bagi FSP Eropa dan AS menjadikan aspek lingkungan hidup dan sosial sebagai bagian analisis jasa pembiayaan mereka, adalah penghargaan mereka terhadap profil publik mereka di negaranya sendiri. Risiko reputasi terkait deforestasi, perubahan iklim (melalui pembangunan di lahan gambut) dan konflik lahan, dapat mengurangi nasabah individu dan lembaga di pasar dalam negeri mereka.

Namun kebalikannya, sedikit sekali kesadaran di Eropa dan Amerika Serikat mengenai isu sosial dan lingkungan terkait dengan posisi petani dalam rantai pasokan kelapa sawit.

Pinjaman, juta dolar AS



Penjaminan surat obligasi dan saham, juta dolar AS



Gambar 2. Distribusi jasa keuangan yang diberikan oleh 15 FSP terbesar pada 15 perusahaan kelapa sawit terbesar

Sumber: Diadaptasi dari CRR (3 Februari 2017), Perbankan lebih banyak memberi dana dibanding investor. Data dari Thomson Reuters dan Bloomberg.

Hal ini tercermin dalam fokus kebijakan ESG dari FSP di wilayah tersebut. Tanpa kesadaran yang cukup mengenai peran petani di pasar dalam negeri, sulit bagi FSP untuk mengadopsi kebijakan lebih komprehensif dalam mempertimbangkan risiko dan peluang dari praktik para petani pada sektor kelapa sawit.

Dibandingkan dengan mitra Eropa dan Amerika Serikat, FSP dari Jepang dan Singapura, memiliki kebijakan ESG yang kurang layak untuk mengurangi risiko praktik pendanaan tak berkelanjutan di sektor kelapa sawit. Sebagian besar FSP Jepang telah mengadopsi Prinsip Ekuator dan menerapkan kebijakan ESG terkait hutan, meskipun kebijakan tersebut sangat tidak spesifik dan tidak memberi perlindungan yang cukup saat memberikan jasa keuangan pada perusahaan sektor kelapa sawit.

FSP dari Indonesia dan Malaysia sangat kurang memiliki kebijakan ESG yang cukup untuk mencegah risiko pembiayaan dari praktik tak berkelanjutan di sektor kelapa sawit. Salah satu FSP dari Malaysia, misalnya, menyatakan telah mengadopsi panduan pembiayaan yang bertanggung jawab, sementara FSP dari Indonesia menyatakan telah menyusun panduan teknis analisis risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan. Namun, panduan tersebut tidak ada yang terpublikasi. Transparansi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan merupakan kunci untuk mewujudkan sektor kelapa sawit lestari. Pada saat ini, beberapa FSP Asia yang diteliti, menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan untuk menjawab isu ESG, tanpa mempublikasikan kebijakan tersebut. Kurangnya transparansi menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas dan kredibilitas kebijakan ESG tersebut.

Pemodal sektor kelapa sawit dan inisiatif berkelanjutan

Beragam inisiatif global dikembangkan untuk memberikan panduan dan mendorong adopsi standar ESG oleh FSP dalam mewujudkan pembiayaan lestari. Pada saat ini, berbagai inisiatif tersebut makin terarah dari menjawab isu lingkungan, sosial dan tata kelola secara umum, menuju ke isu yang lebih spesifik untuk kelapa sawit. Beberapa inisiatif yang ada, yaitu Equator Principle (EP), Principle for Responsible Investment (PRI), RSPO, Koalisi Ceres (CC)⁴ dan Soft Commodity Compact (SCC)⁵.

Partisipasi FSP dalam inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan apakah mereka memperhatikan risiko lingkungan dan sosial pada jasa keuangan yang diberikan pada sektor kelapa sawit. Meskipun, menjadi anggota salah satu inisiatif atau menyatakan sepakat pada prinsip-prinsipnya tidak lantas menjamin praktik pembiayaan berkelanjutan. Namun, setidaknya menunjukkan kesadaran atas isu yang perlu dipertimbangkan dalam investasi sektor sawit secara lebih bertanggung jawab.

Hasil penelitian mengenai partisipasi FSP dalam inisiatif lestari, tercermin dalam penelitian kebijakan ESG-nya. Di antara para penyandang dana perusahaan besar sektor kelapa sawit, sebagian besar pemodal Eropa telah mengadopsi inisiatif sektor kelapa sawit. Seluruh pemodal Eropa menandatangani PRI dan sebagian besar juga menandatangani EP, mengadopsi SCC dan menjadi anggota RSPO. Sebagian besar pemodal AS menandatangani PRI dan EP. Di antara pemodal AS, salah satunya menjadi anggota RSPO dan satu lainnya mengadopsi SCC.

Seluruh penyandang dana Jepang dan Australia menandatangani EP dan PRI. Namun, hanya satu lembaga keuangan dari Australia menjadi anggota RSPO. Penyandang dana lain dari negara-negara tersebut tidak menjadi anggota RSPO atau tidak mengadopsi SCC. Sementara, tidak satupun penyandang dana China, Indonesia, Malaysia atau Singapura aktif atau berpartisipasi dalam berbagai inisiatif tersebut. Tabel 1 menyajikan tinjauan kebijakan dan partisipasi inisiatif ESG dari 15 FSP yang menyediakan dana bagi 15 perusahaan kelapa sawit terbesar.

4 Koalisi Ceres (Ceres Coalition) adalah koalisi multi-pemangku kepentingan yang mendorong inklusi faktor lingkungan dan sosial dalam penyediaan dana. Pada Januari 2017, sekelompok LSM dan investor meluncurkan *Panduan Pelaporan untuk Sawit yang Bertanggung Jawab* pada acara yang digelar oleh Ceres.

5 Soft Commodities Compact adalah sebuah inisiatif perbankan yang terlibat dalam Inisiatif Perbankan Lingkungan (Banking Environment Initiative/BEI) dan Consumer Goods Forum (CGF). Inisiatif ini bertujuan "mengarahkan industri perbankan agar sejalan dengan resolusi CGF untuk mewujudkan bebas deforestasi-bersih pada 2020."

Kami menemukan, di satu sisi tidak ada korelasi antara nilai pinjaman FSP pada perusahaan besar, dengan hasil analisis kebijakan FSP. Kebijakan dan persyaratan FSP dipengaruhi oleh wilayah asal FSP. Gambar 3 menunjukkan hubungan antara analisis kebijakan dengan nilai pinjaman dan jasa penjaminan (saham dan obligasi) yang disediakan oleh FSP dari tiap negara atau wilayah pada perusahaan sawit terbesar.

Analisis kesenjangan dan peluang

Sektor kelapa sawit membutuhkan transformasi besar dalam praktik produksi dan bisnis. FSP berpotensi membantu mendorong perubahan dengan menetapkan persyaratan ESG dalam pelayanan jasa keuangan. Karena perusahaan kelapa sawit bergantung pada FSP untuk mendanai rencana ekspansi, persyaratan ESG dapat mendorong terhindarnya deforestasi, pembangunan lahan gambut dan konflik masyarakat. Mereka juga mampu mengarahkan perusahaan kelapa sawit untuk membeli pasokan kelapa sawit dari petani dengan harga yang adil, sambil juga memberi bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan praktik budi daya.

Pada praktiknya, hanya sebagian FSP yang aktif di sektor kelapa sawit memiliki prasyarat ESG yang layak untuk jasa keuangan mereka. FSP Eropa dan Amerika lebih maju dibanding mitra Asianya dalam adopsi kebijakan ESG, meski mereka masih kurang kesadaran mengenai pentingnya integrasi petani dalam rantai pasokan berkelanjutan. Selain itu, FSP Eropa dan Amerika relatif lebih kecil dalam memberikan jasa keuangan di sektor kelapa sawit dibanding FSP Asia.

Pertimbangan keuntungan cenderung mendominasi proses pengambilan-keputusan FSP Asia, karena sebagian besar produksi kelapa sawit diarahkan ke pasar Asia, di mana pertimbangan berkelanjutan masih kurang. FSP Asia mengadopsi kebijakan ESG yang lebih longgar dan kurang terlibat dalam inisiatif berkelanjutan dibanding mitra Eropa dan Amerika.

Walaupun antara FSP Eropa/AS dan Asia berbeda, perusahaan kelapa sawit masih memiliki akses pendanaan yang luas, terlepas dari praktik bisnis mereka. Oleh karena itu, peluang kontribusi FSP dalam memperkuat sektor kelapa sawit berkelanjutan masih belum teroptimalkan.

FSP dan kelapa sawit: Apa langkah selanjutnya?

Meski potensi dampak FSP Eropa dan AS pada praktik berkelanjutan lebih rendah dibanding FSP Asia, cara mereka mensyaratkan ESG sebagai bagian integral dari jasa keuangan yang diberikan pada perusahaan kelapa sawit cukup menggembirakan. Melalui cara ini, FSP dapat

Tabel 1. Kebijakan dan partisipasi FSPa dalam inisiatif permodalan lestari

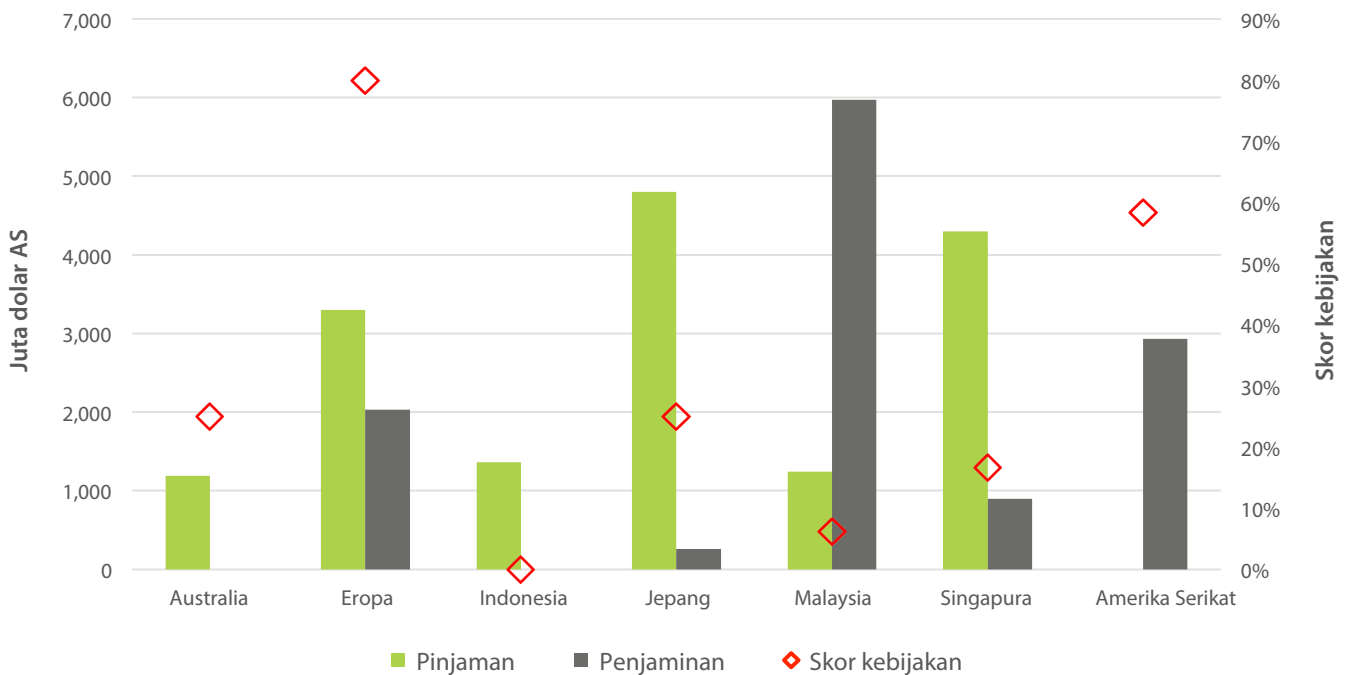
Negara	Penyedia Jasa Keuangan	Memiliki kebijakan ESG	Kebijakan khusus kelapa sawit	Kebijakan mensyaratkan sertifikasi RSPO	Kebijakan inklusi petani	FSP menjadi anggota atau merujuk pada				
						EP	PRI	RSPO	CC	SCC
Australia	ANZ	●	-	-	-	●	●	●	-	-
	Commonwealth Bank	●	-	-	-	●	●	-	-	-
Cina	CITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eropa	Deutsche Bank	●	●	●	-	-	●	-	-	●
	Credit Suisse	●	●	●	-	●	●	●	-	-
	BNP Paribas	●	●	●	●	●	●	●	-	●
	HSBC	●	●	●	-	●	●	●	-	-
	Rabobank	●	●	●	-	●	●	●	-	-
Indonesia	BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mandiri	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Jepang	Mitsubishi UFJ	●	-	-	-	●	●	-	-	-
	Mizuho	●	-	-	-	●	●	-	-	-
	Sumitomo Mitsui	●	-	-	-	●	●	-	-	-
Malaysia	CIMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maybank	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	RHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Public Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Singapura	DBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OCBC	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	UOB	●	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	Citigroup	●	●	●	-	-	-	●	-	-
	Morgan Stanley	●	-	-	-	-	●	-	-	-
	JPMorgan Chase	●	●	●	-	●	●	-	-	●

berkontribusi memberikan tekanan yang juga telah diberikan oleh konsumen, perusahaan pengelola, pemerintah dan LSM untuk terus melakukan transformasi sektor kelapa sawit. Namun, FSP Eropa dan Amerika masih harus menunjukkan kesadaran lebih mengenai kebutuhan dan praktik bisnis petani. Kebijakan ESG lebih komprehensif akan membantu menekan pelanggan mereka – perusahaan kelapa sawit besar – untuk turut mengatasi tantangan yang dihadapi petani dalam rantai pasokan mereka.

Agar lebih efektif mendorong sektor kelapa sawit, perhatian lebih besar harus diarahkan pada peran FSP Asia, sebagai sumber utama jasa keuangan di sektor kelapa sawit. Kegagalan melakukan hal ini akan memperburuk situasi yang ada, perusahaan kelapa sawit

jadi tidak mematuhi standar lestari dan mendapat akses keuangan tanpa syarat. Berbagai perusahaan tersebut juga tetap akan mendapat akses ke pasar Asia yang kurang memperhatikan standar lestari dari konsumen, perusahaan pengolahan dan pemerintah. Kondisi ini memicu ancaman munculnya dua pasar dengan standar berbeda. Di satu pasar, sektor kelapa sawit mengadopsi praktik lestari dengan fokus pasar ekspor Eropa dan AS, serta akses pendanaan dari Eropa dan AS. Di pasar lainnya akan melanjutkan skenario bisnis seperti biasa, dengan fokus pasar Asia dan mendapatkan pendanaan dari FSP Asia.

Tren mengkhawatirkan ini, terlalu rumit untuk ditangani hanya melalui intervensi dari sektor keuangan. Akan sangat menolong jika FSP Asia mengikuti contoh mitra Eropa dan AS dengan mengadopsi kebijakan



Gambar 3. Nilai pinjaman dan penjaminan oleh FSP tiap negara dibandingkan dengan rata-rata skor kebijakan

Catatan: Kebijakan FSP diberi skor dalam empat topik, yaitu: apakah memiliki kebijakan ESG; apakah ada kebijakan khusus kelapa sawit; apakah disyaratkan sertifikasi RSPO; dan apakah disyaratkan inklusi petani. Untuk tiap identifikasi kebijakan, diberi skor 25%. FSP juga diberi skor, ketika berpartisipasi dalam EP, PRI, RSPO, CC dan SCC, dengan nilai masing-masing 20%. Skor negara/kawasan merupakan skor rata-rata FSP di negara/kawasan tersebut.

ESG, untuk menjadi syarat jasa keuangan mereka. Hal ini juga menjadi kebutuhan FSP Eropa dan AS juga, karena akan membangun lahan/pasar persaingan yang setara untuk seluruh FSP. Hal ini bisa didorong melalui tiga pengembangan:

Pertama, penelitian lebih mendalam dan analisis risiko dapat meningkatkan kesadaran pada FSP Asia mengenai pentingnya menerapkan persyaratan ESG untuk mendapatkan jasa keuangan karena skenario bisnis seperti biasa tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang. Konsumen dan perusahaan pengolahan di Asia, serta pemerintah akan mempersulit perusahaan untuk melakukan ekspansi jika menyebabkan deforestasi, penggunaan lahan gambut dan konflik masyarakat. Perusahaan yang memilih strategi seperti itu, akan kehabisan peluang untuk ekspansi dan menghadapi risiko area konsesi mereka berubah menjadi aset terlantar, dan mengakibatkan risiko keuangan lebih besar bagi FSP lain yang tidak mengadopsi kebijakan ESG.

Kedua, FSP dari Eropa dan Amerika Utara – serta berbagai inisiatif lestari global seperti RSPO, PRI dan EP – dapat lebih meningkatkan tekanan pada FSP Asia untuk mengadopsi kebijakan ESG yang lebih ketat. Pasar keuangan saling terkait di tingkat global, dan FSP Asia juga bergantung pada kolaborasi dengan mitra Eropa dan AS, begitu pula

sebaliknya. Tantangan bagi FSP Eropa dan AS adalah memanfaatkan saling ketergantungan ini secara strategis.

Ketiga, perkembangan kebijakan yang menggembirakan tengah berlangsung, seperti yang sedang berlangsung di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. OJK dan regulator keuangan di negara lain sudah mulai mengakui bahwa sektor keuangan domestik bisa berperan lebih aktif dalam memperkuat tumbuhnya ekonomi berkelanjutan nasional, terfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan memberi nilai tambah. Melalui kaca mata ini, transisi berkelanjutan sektor kelapa sawit, termasuk integrasi petani dalam rantai pasokan berkelanjutan menempati prioritas tinggi. Oleh karena itu, regulator keuangan mencari cara untuk meminta FSP lokal untuk menetapkan persyaratan ESG yang layak atas jasa keuangan mereka.

Tiga tahap perubahan ini – pemahaman lebih baik atas risiko bisnis seperti biasa, tekanan dari perbankan internasional dan tekanan dari regulator domestik – diharapkan dapat mendorong adopsi kebijakan ESG oleh FSP Asia dan menciptakan lapangan permainan/pasar yang setara bagi FSP dari berbagai wilayah. Pertimbangan ini merupakan prasyarat untuk membuat kontribusi FSP yang optimal dalam mewujudkan sektor kelapa sawit lebih berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) melalui proyek "Peran Permodalan dalam Integrasi Petani Kelapa Sawit pada Rantai Pasokan Berkelanjutan." Penelitian ini merupakan bagian dari Program Penelitian CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Wanatani (CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry/CRP-FTA). Penelitian ini didukung oleh CGIAR Fund Donors. Daftar donatur Fund bisa dilihat di: www.cgiar.org/funders/

Referensi

Bronkhorst E et al. 2017. Current Practices and Innovations in Smallholder Finance - Long-term Financing Solutions

to Promote Sustainable Supply Chains. Occasional Paper #, CIFOR, SNV, Financial Access. Bogor, Indonesia).

Kusumaningtyas R dan van Gelder JW 2017. Towards responsible and inclusive financing of the palm oil sector. Occasional Paper #, CIFOR, Profundo. Bogor, Indonesia.

PSDOnline, "Oil, palm; oil, palm kernel – export – 2012-2016", USDA Foreign Agricultural Service, online: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>, viewed in February 2017.

PSDOnline, "Oil, palm; oil, palm kernel – domestic consumption-2016", USDA Foreign Agricultural Service, online: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>, dilihat pada Februari 2017.

PSDOnline, "Oil, palm; oil, palm kernel – domestic consumption – 2012–2016", USDA Foreign Agricultural Service, online: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>, dilihat pada Februari 2017.



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA) adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR dan TBI.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



cifor.org

forestsnews.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.

